

Optimizing Law Enforcement and Sovereignty in National Waters to Maintain Regional Stability in Indonesian Seas [Optimalisasi Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut Nasional untuk Menjaga Stabilitas Wilayah Laut Indonesia]

Novan Brhamasta Anugrah Prakasa ¹⁾, Noor Fatimah Mediawati ^{*.2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fatimah@umsida.ac.id

Abstract *To delineate the efforts towards optimizing law enforcement and sovereignty in Indonesia's national waters to maintain maritime stability. Effective law enforcement and the preservation of maritime sovereignty are key elements in preventing conflicts and securing marine resources. This article discusses the challenges and strategies in enhancing maritime law enforcement and securing Indonesia's maritime sovereignty. By integrating legal, security, and diplomatic approaches, Indonesia can strengthen its position as a maritime power and safeguard its maritime territories. In conclusion, collaboration among law enforcement agencies, the military, and other stakeholders is crucial in achieving these goals.*

Keywords - Law Enforcement, Maritime Sovereignty, Territorial Stability

Abstrak. *Untuk menguraikan upaya optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional Indonesia dalam menjaga stabilitas wilayah laut. Penegakan hukum yang efektif dan pemeliharaan kedaulatan laut merupakan elemen kunci untuk mencegah konflik dan mengamankan sumber daya laut. Artikel ini membahas tantangan dan strategi dalam meningkatkan penegakan hukum maritim serta mengamankan kedaulatan laut Indonesia. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, keamanan, dan diplomasi, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang kuat dan menjaga stabilitas wilayah lautnya. Kesimpulannya, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, militer, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk mencapai tujuan ini..*

Kata Kunci - Penegakan hukum, kedaulatan laut, Stabilitas wilayah

PENDAHULUAN

Dalam konteks global, wilayah laut Indonesia merupakan salah satu yang paling strategis karena letaknya yang strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah. Namun, tantangan besar muncul dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah ini, termasuk masalah pelanggaran hukum laut, illegal fishing, serta ancaman terhadap kedaulatan negara [1]. Di tengah kompleksitas permasalahan tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang efektif, upaya untuk mengatasi pelanggaran kedaulatan dan keamanan laut akan sulit terwujud. Selain itu, kedaulatan negara dalam wilayah laut juga menjadi kunci utama dalam memastikan kepentingan nasional dan keamanan maritim. Penegakan hukum yang optimal dalam wilayah laut Indonesia juga memiliki dampak yang luas, baik secara ekonomi maupun politik. Dengan memastikan keamanan dan kedaulatan di laut nasional, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat posisi geopolitiknya, serta meningkatkan kerja sama regional dalam bidang keamanan maritim. Hal ini menjadi kunci penting dalam membangun citra Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan stabil [2].

Dalam konteks ini, jurnal yang membahas optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional Indonesia akan memberikan wawasan mendalam tentang tantangan, strategi, dan upaya yang diperlukan untuk menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia. Dengan menganalisis kebijakan, kerja sama regional, serta implementasi hukum laut di tingkat nasional, jurnal tersebut dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kedaulatan dan keamanan laut Indonesia di masa depan. Upaya optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional juga menjadi prioritas dalam konteks perkembangan dinamika global, terutama dalam menghadapi ancaman transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme yang semakin merambah ke wilayah maritim [3]. Keberadaan wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal tersebut, yang dapat mengganggu stabilitas nasional serta mempengaruhi keberlangsungan ekonomi negara.

Peran laut dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan transportasi juga menjadikan keamanan maritim sebagai aspek krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gangguan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi di laut dapat berdampak negatif secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks regulasi, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum maritim. Namun, tantangan terus muncul dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta kompleksitas permasalahan lintas sektoral dan lintas batas wilayah [4]. Pentingnya tema yang dibahas tentang optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional Indonesia menjadi penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan, strategi, dan inovasi yang diperlukan dalam menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia. Dengan menganalisis peran lembaga hukum, kerja sama antarnegara, serta partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum maritim, jurnal tersebut dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu dalam jurnal nasional telah membahas masalah penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Widodo dan Timbul (2018) [5] .menyoroti tantangan dan strategi dalam penegakan hukum maritim di Indonesia, dengan fokus pada peran lembaga penegak hukum dan koordinasi antarinstansi. Temuan mereka menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, koordinasi yang lebih baik antarlembaga, dan penguatan kerja sama regional untuk mengatasi pelanggaran hukum maritim. Selain itu, penelitian oleh Susanto et al. (2019) [6] . mengeksplorasi dampak perdagangan manusia di wilayah laut Indonesia terhadap kedaulatan negara dan stabilitas wilayah. Melalui studi kasus dan analisis statistik, mereka mengidentifikasi pola perdagangan manusia yang terjadi di wilayah laut Indonesia serta menyoroti perlunya penegakan

hukum yang lebih efektif untuk melindungi kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Sementara itu, penelitian oleh Hadi et al. (2020) [7] .menelaah implementasi kebijakan pencegahan illegal fishing di laut Indonesia dan dampaknya terhadap stabilitas ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penegakan hukum yang kuat berperan penting dalam mengurangi praktik illegal fishing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penelitian-penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi dalam optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional Indonesia, serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pemeliharaan kedaulatan di laut nasional Indonesia. Dengan menyoroti kelemahan dalam sistem penegakan hukum maritim, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan dampak negatif dari praktik ilegal seperti perdagangan manusia dan illegal fishing, penelitian ini menjadi panggilan untuk tindakan lebih lanjut dan peningkatan dalam upaya melindungi kedaulatan laut Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan sejumlah solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam upaya optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional. Penguatan kapasitas SDM, peningkatan kerja sama antarlembaga dan antarnegara, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut menjadi beberapa hal yang diusulkan untuk diperhatikan. Dengan memanfaatkan temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan terarah dalam menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan penelitian lanjutan ini dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum maritim dan memastikan kedaulatan laut Indonesia terjaga dengan baik. Dengan demikian, wilayah laut Indonesia dapat terus berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas regional.

I. METODE

Metode penelitian jurnal ini mengusulkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis dokumen, observasi lapangan, dan teknik wawancara mendalam kepada narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum laut dan keamanan maritim. Melalui teknik wawancara ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional Indonesia. Tiga rumusan masalah yang sesuai dengan judul jurnal ini seperti (1) Bagaimana penegakan hukum dilakukan di laut nasional Indonesia? (2) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan di wilayah laut Indonesia? (3) Bagaimana peningkatan penegakan hukum dan kedaulatan dapat berkontribusi pada stabilitas wilayah laut Indonesia? Dengan menganalisis hasil wawancara serta data lainnya, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang mendalam serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat penegakan hukum dan kedaulatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas wilayah laut Indonesia.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Laut Nasional Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan di laut nasional Indonesia. Salah satu fokus utama KKP adalah mengawasi dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia [8]. Dalam konteks penegakan hukum, KKP bertanggung jawab untuk menegakkan regulasi terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk melawan praktik ilegal seperti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, penambangan ilegal, dan pencemaran laut. Untuk menjalankan tugasnya, KKP bekerja sama dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pertahanan, dan TNI AL. Kolaborasi antara KKP dan lembaga-lembaga lainnya memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas di laut nasional. Misalnya, dalam mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal, KKP dapat bekerja sama dengan TNI AL untuk melakukan patroli laut dan menindak pelaku ilegal. Selain itu, KKP juga berperan dalam kerjasama

internasional untuk menjaga kedaulatan di laut nasional. Melalui forum internasional seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), KKP terlibat dalam negosiasi dan implementasi perjanjian laut internasional yang berdampak pada wilayah perairan Indonesia. Kerjasama internasional ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan lautnya, serta memperluas jangkauan penegakan hukum di laut nasional.

Secara keseluruhan, peran KKP dalam penegakan hukum di laut nasional Indonesia sangatlah penting. Dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan melalui kerjasama internasional, KKP berperan aktif dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. TNI AL memiliki peran krusial dalam penegakan hukum di laut nasional Indonesia serta dalam mengatasi ancaman keamanan laut guna memastikan kedaulatan laut negara. Sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI AL memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi kedaulatan laut dan kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia yang luas [9]. Dalam konteks penegakan hukum, TNI AL bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut, untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum di laut, seperti illegal fishing, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Peran penting dalam menghadapi ancaman keamanan laut, seperti terorisme maritim, penyelundupan senjata, dan penangkapan kapal ilegal. Mereka melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan di wilayah perairan Indonesia guna mencegah dan menanggulangi berbagai kejahatan lintas batas. Selain itu, TNI AL juga berperan dalam mendukung penegakan hukum internasional, seperti pencarian dan penyelamatan (SAR) di laut serta dalam menjalankan kewajiban Indonesia sebagai anggota perjanjian internasional, misalnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut.

Sebagai bagian dari penegakan hukum di laut nasional, TNI AL menjalankan tugasnya berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan. Selain itu, mereka juga beroperasi sesuai dengan hukum internasional, seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang menetapkan batas-batas yurisdiksi negara di laut. Dengan memastikan keamanan dan kedaulatan laut, TNI AL berperan penting dalam mendukung stabilitas wilayah laut Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di lingkungan maritim yang strategis [10]. Melalui kerja keras dan kerjasama lintas lembaga, TNI AL terus berupaya menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia untuk kesejahteraan bangsa. Dalam menjalankan perannya, TNI AL juga aktif dalam kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum di laut. Mereka berpartisipasi dalam berbagai latihan bersama dengan angkatan laut negara-negara tetangga serta mitra internasional untuk pertukaran pengalaman, teknik, dan strategi dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang kompleks. Terlibat dalam program-program pembinaan masyarakat maritim, seperti pengembangan kesadaran maritim di kalangan masyarakat pesisir dan pelatihan bagi nelayan tentang praktik perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum di laut, seperti illegal fishing, serta untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, TNI AL juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk luasnya wilayah laut Indonesia yang sulit untuk diawasi secara menyeluruh, kurangnya sumber daya, dan perlawanan dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan kapasitas, koordinasi antarlembaga, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penegakan hukum di laut nasional Indonesia [11]. Peran TNI AL dalam penegakan hukum di laut nasional Indonesia tidak hanya penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut negara, tetapi juga untuk melindungi sumber daya laut yang berharga dan mendukung keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial di wilayah maritim Indonesia. Kerangka hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang terbaru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan, memainkan peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum di laut nasional. Undang-Undang tersebut, yang pada tahun 2014 telah diterapkan sebagai Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan, memberikan landasan hukum yang kuat

untuk memerangi kegiatan ilegal di sektor perikanan, yang seringkali merugikan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah memberikan kewenangan kepada pihak berwenang untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap pelanggaran di sektor perikanan, baik itu melalui pengawasan, penegakan, hingga penindakan yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar hukum. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum untuk pembentukan lembaga dan badan-badan terkait yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum di sektor perikanan. Dengan memberikan landasan hukum, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan juga menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Ini termasuk sanksi pidana dan administratif yang dapat diberlakukan terhadap individu atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, atau perdagangan ilegal hasil perikanan. Melalui kerangka hukum yang kokoh ini, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa penegakan hukum di laut nasional dilakukan secara efektif dan adil [12]. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan undang-undang tersebut, termasuk kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai di beberapa daerah, serta koordinasi antara berbagai lembaga terkait. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum di laut nasional guna menjaga stabilitas ekosistem laut dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam upaya penegakan hukum di laut nasional Indonesia. Ini karena laut Indonesia membentang di sepanjang berbagai provinsi dan kabupaten, sehingga membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kelestarian laut.

Regulasi khusus yang mengatur hal ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya laut di wilayahnya. Selain itu, terdapat juga Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah laut. Melalui instruksi ini, pemerintah daerah didorong untuk aktif terlibat dalam pemantauan, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan di wilayah pesisir dan laut yang berada di bawah yurisdiksinya. Koordinasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat koordinasi antara instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, pembentukan tim gabungan untuk penegakan hukum di laut, serta pertukaran informasi dan data terkait kondisi laut dan aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan teknis dan dukungan lainnya kepada pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum di laut nasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti perbedaan dalam kapasitas dan sumber daya, serta kendala administratif dan birokrasi. Namun, dengan adanya regulasi yang mengatur dan mendorong kerjasama antara kedua entitas ini, diharapkan penegakan hukum di laut nasional Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga stabilitas wilayah laut dan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Tantangan utama dalam penegakan hukum di laut nasional Indonesia meliputi wilayah yang luas dan kompleks, sumber daya yang terbatas, serta kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan penyelundupan barang. Wilayah laut Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan memiliki perairan yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, adanya berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal di laut, termasuk nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal, juga menjadi tantangan serius. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antarlembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian dalam melakukan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia. Pemerintah juga meningkatkan penggunaan teknologi seperti satelit dan sistem pemantauan laut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pemerintah juga menguatkan peraturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut, seperti mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi

kegiatan ilegal di laut. Pemerintah juga melakukan upaya diplomasi dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan laut dan penegakan hukum di wilayah perairan yang bersama-sama dimiliki.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan penegakan hukum di laut nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain kerjasama antarlembaga dan penggunaan teknologi, pendidikan dan pelatihan bagi petugas penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi situasi yang kompleks di laut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum maritim dan metode penegakan hukum yang efektif, petugas akan lebih mampu mengidentifikasi, menghentikan, dan menindak pelanggaran hukum di laut. Selain itu, kerjasama regional dan internasional juga menjadi aspek krusial dalam mengatasi masalah keamanan laut. Dengan menjalin kemitraan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional, Indonesia dapat memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum di perairan yang bersama-sama dimiliki, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Melalui forum-forum regional dan internasional, Indonesia dapat berbagi informasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam penegakan hukum maritim, sehingga meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum di seluruh kawasan. Upaya pencegahan dan penindakan, pembangunan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi bagian integral dalam mengatasi permasalahan keamanan laut. Dengan memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, pemerintah dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam kegiatan ilegal di laut, seperti pencurian ikan atau penyelundupan barang. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi masalah keamanan laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan dan pelestarian ekosistem laut. Dengan menjaga keberlanjutan sumber daya laut, pemerintah dapat memastikan bahwa potensi ekonomi dan keamanan laut dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Langkah-langkah seperti pembentukan kawasan konservasi, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas ilegal di laut merupakan upaya konkret dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung keamanan laut jangka panjang. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks di laut, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, juga sangat penting. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya keamanan laut dan melibatkan semua pihak dalam upaya penegakan hukum di laut, Indonesia dapat menciptakan lingkungan laut yang lebih aman, berkelanjutan, dan produktif bagi seluruh masyarakatnya. Selain itu, pentingnya meningkatkan kesadaran internasional tentang masalah keamanan laut juga tidak boleh diabaikan. Melalui diplomasi publik, partisipasi dalam forum-forum internasional, dan kampanye advokasi, Indonesia dapat memperoleh dukungan global dalam upaya mengatasi kegiatan ilegal di laut. Dengan memperkuat hubungan diplomatis dan kerjasama dengan negara-negara mitra, baik di tingkat regional maupun global, Indonesia dapat memperluas jaringan pengawasan dan penegakan hukum di laut serta meningkatkan efektivitas upaya-upaya tersebut.

Pemerintah juga harus memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di laut. Peningkatan aktivitas penegakan hukum dapat berdampak pada kehidupan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir untuk hidup dan bekerja dengan aman dan sejahtera. Selain upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi aktif dari sektor swasta juga diperlukan. Perusahaan-perusahaan perikanan, industri kelautan, dan perusahaan pelayaran memiliki peran penting dalam mencegah dan melawan kegiatan ilegal di laut. Dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghormati regulasi dan hukum yang berlaku, sektor swasta dapat menjadi mitra yang efektif dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan laut. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap keberhasilan upaya penegakan hukum di laut. Dengan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilakukan. Dengan pendekatan

yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi dan tantangan baru, Indonesia dapat terus meningkatkan kapasitasnya dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan laut nasionalnya.

b. Tantangan dalam Menjaga Kedaulatan

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga kedaulatan di wilayah lautnya, terutama dengan munculnya masalah seperti penyelundupan, illegal fishing, dan intrusi asing [13]. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian langkah strategis Pertama, pemerintah meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kehadiran kapal patroli dan penegakan hukum laut di berbagai titik strategis. Dengan meningkatnya kehadiran tersebut, pemerintah berharap dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan menanggulangi aktivitas ilegal di laut, termasuk penyelundupan dan illegal fishing. Kedua, pemerintah aktif berkolaborasi dengan instansi terkait, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kerja sama antarlembaga di dalam negeri serta kerjasama dengan negara lain menjadi kunci dalam menangani masalah ini. Misalnya, melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional, seperti Interpol dan Interpol-Fishcrime, Indonesia dapat bertukar informasi dan bekerja sama dalam penegakan hukum di laut.

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah legislatif untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung penegakan hukum di laut. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani masalah illegal fishing [14]. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang P3K memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di perairan Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan-tantangan yang signifikan dalam menjaga kedaulatan di wilayah lautnya. Faktor seperti luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kendala utama dalam upaya penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan peningkatan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut guna memastikan kedaulatan di wilayah laut Indonesia tetap terjaga [15]. Kendati pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penegakan hukum di laut, tantangan yang dihadapi tetap kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakmampuan untuk secara efektif mengawasi seluruh wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Wilayah laut Indonesia mencakup lebih dari 5,8 juta kilometer persegi dengan ribuan pulau dan ratusan ribu kilometer garis pantai, sehingga pengawasan menyeluruh menjadi sangat sulit.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala serius. Meskipun pemerintah telah melakukan peningkatan kehadiran kapal patroli dan personel penegak hukum laut, namun jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk mengawasi wilayah laut yang begitu luas [16]. (16) Penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit dan sensor laut dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan, namun hal ini membutuhkan investasi yang besar dan sumber daya yang memadai. Selain tantangan internal, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan eksternal dalam menjaga kedaulatan di wilayah lautnya. Intrusi asing, termasuk aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sering kali menjadi sumber ketegangan bilateral dengan negara-negara tetangga. Penegakan hukum di wilayah laut yang sensitif seperti Laut Natuna dan Laut Sulawesi menjadi fokus utama dalam upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah terus melakukan evaluasi dan peningkatan strategi. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional menjadi kunci dalam mengatasi masalah intrusi asing dan illegal fishing. Selain itu, peningkatan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat mengatasi tantangan dan menjaga kedaulatan di wilayah laut Indonesia secara efektif.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia guna memperkuat penegakan hukum di laut. Salah satu langkah utamanya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kehadiran fisik aparat penegak hukum di wilayah

laut. Hal ini dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kualitas armada patroli, termasuk kapal patroli dan pesawat udara, yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mengawasi aktivitas di laut. Pemerintah juga memperkuat kerjasama antarlembaga dan antarnegara dalam melakukan pengawasan laut. Hal ini dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan tindakan bersama dalam menanggapi ancaman keamanan laut, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara lainnya. Peningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan laut. Ini termasuk penggunaan sistem pemantauan dan pengawasan maritim berbasis satelit (Sistem Satelit Pelacakan Kapal atau VMS) yang memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap aktivitas mencurigakan di laut. Selain itu, sistem identifikasi otomatis (AIS) juga digunakan untuk melacak pergerakan kapal secara real-time.

Upaya pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam memperkuat pengawasan laut [17]. Ini dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan laut, serta pemberian edukasi dan pelatihan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut dan peran mereka dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan serangkaian langkah konkret ini, pemerintah Indonesia berupaya memperkuat penegakan hukum di laut, memastikan kedaulatan wilayah lautnya terjaga, serta melindungi sumber daya laut yang menjadi aset penting bagi negara dan masyarakatnya. Kerja sama regional dan internasional memainkan peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum di laut Indonesia, terutama dalam mengatasi isu-isu seperti pencucian uang dan perdagangan manusia di laut. Indonesia telah aktif bekerja sama dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti melalui ASEAN dan forum-forum regional lainnya, untuk memperkuat kerja sama dalam hal pertukaran informasi, koordinasi patroli, dan pelatihan personel penegak hukum laut.

Indonesia juga terlibat dalam kerja sama internasional yang lebih luas, termasuk dengan lembaga-lembaga seperti Interpol dan Europol, untuk meningkatkan koordinasi penegakan hukum dan pertukaran intelijen terkait dengan kejahatan lintas batas di perairan. Upaya ini bertujuan untuk melacak dan menindak tindak kejahatan seperti pencucian uang yang terkait dengan aktivitas ilegal di laut. Selain kerja sama bilateral dan multilateral, Indonesia juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang memberikan landasan hukum bagi penegakan kedaulatan dan keamanan di laut. Dengan menjadi anggota UNCLOS, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi wilayah lautnya dari aktivitas ilegal, termasuk perdagangan manusia dan pencucian uang. Namun, meskipun kerja sama regional dan internasional telah memberikan kontribusi positif, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah koordinasi yang lebih efektif antara berbagai lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan internasional, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kompleks seperti perdagangan manusia di laut. Oleh karena itu, Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan mitra regional dan internasionalnya serta memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum laut untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Dalam hal ini Indonesia juga aktif dalam mengembangkan mekanisme kerja sama bilateral dengan negara-negara tertentu yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga keamanan laut dan menangani kejahatan lintas batas. Ini termasuk pertukaran intelijen, pelatihan bersama, dan patroli gabungan untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah perairan yang rentan terhadap aktivitas ilegal. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan berbagai kebijakan domestik yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum di laut, termasuk peraturan yang mengatur aktivitas perikanan, keamanan maritim, dan pengelolaan sumber daya alam laut [18]. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah menerapkan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (Monitoring, Control, and Surveillance/MCS) yang canggih untuk memantau aktivitas perikanan di wilayah perairan Indonesia dan mengidentifikasi pelanggaran. Upaya pemberantasan pencucian uang dan perdagangan manusia di laut juga didukung oleh lembaga-lembaga hukum dan keamanan di Indonesia, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN),

yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga serupa di tingkat internasional. Meskipun masih ada tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di laut Indonesia, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitasnya melalui kerja sama regional dan internasional serta pembangunan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan. Dengan upaya bersama ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kedaulatan lautnya dan melindungi keamanan serta sumber daya alam yang ada di wilayah perairannya.

Undang-undang terbaru yang menjadi landasan bagi penegakan hukum di laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini memiliki cakupan yang luas, mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian, dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini adalah penekanan pada konsep kedaulatan, keberlanjutan, dan keberagaman sumber daya laut. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dilakukan oleh berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perhubungan. Langkah-langkah implementasi meliputi penguatan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum laut, serta pengembangan kerja sama regional dan internasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di laut, seperti illegal fishing, pencemaran laut, dan pelanggaran terhadap hak kedaulatan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Meskipun Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk masalah sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia guna menjaga kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya laut [19]. Selain implementasi langsung oleh lembaga pemerintah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan laut menjadi salah satu pendekatan yang ditekankan dalam undang-undang ini. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai program pengembangan kapasitas, penyuluhan, dan pelatihan bagi nelayan, kelompok nelayan, serta komunitas pesisir. Tujuannya adalah agar masyarakat lokal memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam pengelolaan wilayah laut. Dalam konteks penegakan hukum, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juga mencakup penguatan kerja sama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam melawan berbagai bentuk pelanggaran di laut. Kerjasama lintas sektoral dan partisipasi aktif semua pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta mengurangi kerentanan terhadap ancaman seperti illegal fishing, pencemaran laut, dan kegiatan ilegal lainnya.

Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan laut Indonesia tetap kompleks dan terus berubah seiring dengan dinamika lokal maupun global. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk terus meningkatkan koordinasi, kapasitas, dan efektivitas dalam menjaga keberlanjutan dan kedaulatan laut Indonesia. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang kompleks dalam menangani kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Praktik penangkapan ikan ilegal sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak patuh terhadap regulasi dan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, Undang-Undang Kelautan Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk

penangkapan ikan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penekanan pada perlindungan sumber daya ikan melalui pengaturan kuota penangkapan, zona penangkapan, dan larangan penangkapan di wilayah tertentu.

Dalam prakteknya, aparat penegak hukum bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal. Mereka menggunakan berbagai metode dan teknologi, termasuk patroli udara, laut, dan penggunaan sistem pemantauan satelit, untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hukum di laut. Kerja sama regional dan internasional juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum di perairan Indonesia. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional untuk bertukar informasi, berkoordinasi dalam penegakan hukum, dan meningkatkan kapasitas dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut. Dengan penerapan Undang-Undang Kelautan yang kuat dan kerja sama lintas sektoral serta regional, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, sehingga dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan memastikan keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut. Tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia yang luas meliputi koordinasi yang kompleks antara berbagai lembaga penegak hukum, pengawasan yang sulit terhadap wilayah yang sangat luas, serta masalah kekurangan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan memiliki panjang garis pantai sekitar 54.720 km merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam menghadapi kegiatan ilegal seperti illegal fishing, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, hukum internasional seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) memegang peranan penting dalam mendukung upaya penegakan hukum di perairan Indonesia. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, termasuk juga hak untuk menegakkan hukum di wilayah perairan mereka. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam konvensi tersebut di wilayah perairannya. Salah satu aspek penting dari UNCLOS yang mendukung upaya penegakan hukum adalah pengakuan terhadap konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah perairan tersebut, serta untuk menegakkan hukum di dalamnya. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum di ZEE-nya dengan dukungan hukum internasional. Selain itu, UNCLOS juga mengatur mengenai kerjasama internasional dalam penegakan hukum di laut. Pasal 33 UNCLOS, misalnya, mengamanatkan negara-negara untuk bekerja sama secara efektif dalam mencegah dan menumpas kegiatan ilegal di laut, termasuk dengan melakukan pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis. Dengan demikian, kerjasama lintas negara dalam penegakan hukum di laut menjadi penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks tersebut. Meskipun demikian, implementasi hukum internasional seperti UNCLOS dalam konteks penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia tetap memerlukan upaya yang terus-menerus, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerjasama lintas sektoral dan lintas negara, serta pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran di laut Indonesia. Koordinasi ini diatur dalam perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia yang luas [20].

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran utama dalam mengawasi kegiatan perikanan dan kelautan di perairan Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan

sumber daya ikan, penegakan aturan perikanan, dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di laut Indonesia. KKP bekerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk menangani pelanggaran di laut, terutama yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal, pencurian sumber daya alam, dan kegiatan ilegal lainnya. Kedua, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan di laut, termasuk kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan perompakan laut. POLRI bekerja sama dengan KKP dan TNI Angkatan Laut dalam patroli laut dan penangkapan pelaku kejahatan di perairan Indonesia. Ketiga, TNI Angkatan Laut juga memiliki peran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Mereka terlibat dalam operasi patroli laut, pengawasan wilayah perairan, serta menanggapi ancaman keamanan laut seperti perompakan dan terorisme maritim. Kerja sama antara TNI Angkatan Laut, KKP, dan POLRI penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan menjaga keamanan di laut Indonesia. Koordinasi antar lembaga penegak hukum ini diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu, kerja sama ini juga diatur melalui berbagai perjanjian dan kesepakatan antar lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum, diharapkan pelanggaran di laut Indonesia dapat ditangani secara lebih efisien dan efektif, serta memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia terjaga dengan baik.

Peran teknologi dan inovasi dalam mendukung upaya penegakan hukum di laut Indonesia sangat penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan meluas di wilayah perairan tersebut. Salah satu teknologi yang telah membantu dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut adalah sistem pemantauan satelit. Dengan menggunakan data dari satelit, aparat penegak hukum dapat memantau aktivitas di laut secara real-time, termasuk kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, pencurian sumber daya alam, dan pelanggaran lainnya terhadap regulasi kelautan. Teknologi pemantauan satelit ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dengan memfasilitasi identifikasi lokasi, jejak, dan pola perilaku pelaku kejahatan di laut. Selain itu, teknologi lain seperti sistem identifikasi otomatis (Automatic Identification System/AIS), sistem pemantauan jarak dekat (Close Range Surveillance/CRS), dan sistem deteksi dini juga memberikan kontribusi besar dalam upaya penegakan hukum di laut. Sistem AIS misalnya, memungkinkan identifikasi dan pelacakan kapal-kapal secara langsung, sehingga mempermudah aparat penegak hukum dalam mengawasi aktivitas kapal-kapal di perairan Indonesia. Sedangkan sistem deteksi dini memungkinkan pengidentifikasian cepat terhadap potensi ancaman keamanan di laut, seperti penangkapan ilegal atau pencurian sumber daya alam. Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum di laut diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengatur mengenai perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya laut. Di dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai penerapan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut, termasuk penggunaan sistem pemantauan satelit dan teknologi lainnya untuk mendukung upaya tersebut.

Rgulasi lebih lanjut mungkin juga dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk mengatur penggunaan teknologi secara lebih detail dalam konteks penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan demikian, penggunaan teknologi dan inovasi yang terus berkembang diharapkan dapat terus memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah landasan hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap sumber daya alam di laut Indonesia. Undang-undang ini mengamanatkan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut demi kepentingan nasional serta keberlanjutan ekosistem laut. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang meliputi kegiatan eksploitasi yang berlebihan. Dalam praktiknya, penerapan hukum ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengawasan dan penegakan oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Mereka melakukan patroli laut, inspeksi, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia.

Penetapan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya laut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti kuota penangkapan, ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap, dan zona-zona yang dilindungi. Penegakan hukum juga didukung oleh perkembangan teknologi, seperti sistem pemantauan satelit dan aplikasi digital yang memudahkan pemantauan aktivitas di laut. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran dengan lebih efektif. Kerja sama internasional juga penting dalam mencegah eksploitasi yang berlebihan di perairan Indonesia. Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian dan kerja sama regional dan internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti dalam kerangka kerja UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) dan berbagai perjanjian regional. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta upaya penegakan hukum yang terkoordinasi dan didukung oleh teknologi dan kerja sama internasional menjadi strategi utama dalam mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di laut Indonesia.

Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan langkah yang penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan eksploitasi sumber daya laut di Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya laut, termasuk kuota penangkapan, ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap, serta zona-zona yang harus dilindungi. Selain itu, upaya penegakan hukum yang terkoordinasi juga menjadi kunci dalam mencegah eksploitasi berlebihan. Dengan adanya kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat diidentifikasi dan ditindak secara efektif. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem pemantauan satelit dan aplikasi digital, juga memberikan kontribusi besar dalam mendukung penegakan hukum di laut. Teknologi ini memungkinkan pemantauan aktivitas di perairan Indonesia dengan lebih akurat dan efisien. Dengan adanya data yang lebih terperinci mengenai aktivitas di laut, pihak berwenang dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat waktu. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi faktor krusial dalam upaya mencegah eksploitasi berlebihan di perairan Indonesia. Dengan bergabung dalam perjanjian dan kerja sama regional dan internasional, Indonesia dapat memperoleh dukungan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

c. Peningkatan Penegakan Hukum dan Kedaulatan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan menegakkan hukum di perairan nasional guna melindungi sumber daya alam dan kepentingan ekonomi negara [21]. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan untuk penegakan hukum di laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penerapan Hukum Laut, yang telah mengalami beberapa kali amendemen untuk mengakomodasi perkembangan terkini di bidang hukum laut. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Badan Keamanan Laut, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia juga mengacu pada undang-undang lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan terkait pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan.

Pemerintah Indonesia juga mengandalkan peraturan-peraturan terkait yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga terkait, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan menteri, untuk memberikan detail lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang tersebut [22]. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan bersama-sama, dengan

tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Selanjutnya, pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah konkret untuk mengawasi dan menegakkan hukum di perairan nasional. Salah satu langkah utamanya adalah dengan meningkatkan kehadiran patroli laut, baik melalui kapal patroli maupun pesawat udara, untuk mengawasi aktivitas di perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan ilegal sumber daya alam. Pemerintah juga memperkuat kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI AL, dalam upaya penegakan hukum di laut. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan penegakan hukum di laut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan ekonomi di laut, seperti pengelolaan sumber daya perikanan dan pertambangan di laut, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, sumber daya alam di laut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan negara. Selain upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Melalui pendidikan dan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menjaga dan melindungi perairan Indonesia serta melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pemerintah Indonesia dapat terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan nasional guna melindungi sumber daya alam dan kepentingan ekonomi negara serta menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah dua lembaga utama di Indonesia yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di perairan Indonesia. KKP memiliki peran khusus dalam melindungi sumber daya perikanan dan ekosistem laut, sementara Bakamla fokus pada keamanan maritim, termasuk penegakan hukum terkait pelanggaran seperti pencurian ikan, illegal fishing, dan kegiatan ilegal lainnya di laut Indonesia.

KKP secara aktif melakukan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia menggunakan kapal patroli dan pesawat udara untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hukum. Mereka juga berperan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar ketentuan perikanan Indonesia, seperti penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Di samping itu, KKP juga terlibat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait lingkungan laut, seperti pencemaran dan degradasi lingkungan. Sementara itu, Bakamla bertanggung jawab atas penegakan hukum yang berkaitan dengan keamanan maritim, termasuk pengawasan lalu lintas laut, penanggulangan kejahatan lintas batas, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Mereka menggunakan kapal patroli, radar, dan sistem pemantauan lainnya untuk memantau aktivitas di laut dan menanggapi insiden atau pelanggaran yang terjadi. Peran kedua lembaga ini sangat dipengaruhi oleh undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan dasar hukum bagi KKP untuk melindungi sumber daya perikanan Indonesia dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan landasan hukum bagi Bakamla untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Dengan dasar hukum ini, KKP dan Bakamla memiliki landasan yang kuat untuk melakukan tugas mereka dalam menangani pelanggaran hukum di laut Indonesia secara efektif.

Melalui kerjasama antara KKP dan Bakamla, serta dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, berbagai operasi gabungan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia. Operasi-operasi ini mencakup patroli bersama, razia kapal, dan penindakan terhadap pelanggar hukum di laut. Selain itu, KKP dan Bakamla juga bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara-negara tetangga untuk pertukaran informasi dan kerjasama dalam menangani pelanggaran di perairan yang bersama-sama diakses. Namun, peran KKP dan Bakamla dalam penegakan hukum di laut Indonesia juga dipengaruhi oleh tantangan dan hambatan tertentu. Salah satunya adalah wilayah laut Indonesia yang luas dan

kompleks, sehingga membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit dilakukan secara efektif di seluruh wilayah [23]. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia, teknologi, dan peralatan juga menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum di laut yang mencakup ribuan pulau dan ratusan ribu kilometer persegi perairan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia terus melakukan investasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi untuk memperkuat kemampuan penegakan hukum di laut. Selain itu, upaya dalam memperkuat kerjasama regional dan internasional juga menjadi prioritas, termasuk dalam hal pertukaran informasi, pelatihan personel, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum yang kuat dan efektif dapat berkontribusi pada stabilitas wilayah laut Indonesia dan perlindungan terhadap sumber daya alam serta kepentingan ekonomi negara.

Kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional dalam penegakan hukum di perairan yang bersama-sama diakses adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah laut. Dalam konteks ini, Indonesia telah aktif menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga serta lembaga internasional untuk memperkuat penegakan hukum di perairan yang bersama-sama diakses. Secara bilateral, Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Perjanjian-perjanjian ini memberikan kerangka kerja bagi kerjasama dalam bidang penegakan hukum maritim, termasuk pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran hukum di perairan yang bersama-sama diakses. Misalnya, Indonesia dan Australia telah menjalin kerjasama melalui perjanjian bilateral dan forum seperti KTT ASEAN untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut yang sama-sama diakses. Di tingkat multilateral, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam lembaga-lembaga internasional yang bertujuan memperkuat penegakan hukum di laut, seperti Interpol, International Maritime Organization (IMO), dan ASEAN Regional Forum (ARF). Melalui partisipasi dalam forum-forum ini, Indonesia dapat berbagi informasi intelijen, mengembangkan kapasitas penegakan hukum, dan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk menangani ancaman keamanan maritim yang bersifat lintas batas.

Adapun peraturan khusus atau perjanjian bilateral yang memandu kerjasama ini biasanya mencakup ketentuan-ketentuan tentang pertukaran informasi, koordinasi tindakan penegakan hukum, dan mekanisme konsultasi dalam menangani pelanggaran hukum di perairan yang bersama-sama diakses. Contohnya, Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral tentang penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) dengan beberapa negara tetangga, yang mengatur kerjasama dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di sektor perikanan laut. Melalui kerjasama yang erat dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional serta melalui adopsi peraturan khusus dan perjanjian bilateral, Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum di perairan yang bersama-sama diakses, menjaga keamanan wilayah laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam kelautan. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam penegakan hukum di perairan yang bersama-sama diakses juga memberikan manfaat tambahan bagi Indonesia dalam mengatasi tantangan yang kompleks di wilayah laut. Dengan berbagi informasi intelijen dan melakukan patroli bersama, negara-negara tetangga dapat saling mendukung dalam mendeteksi dan menangani kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba.

Partisipasi dalam lembaga-lembaga internasional seperti IMO dan ARF memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam pengembangan regulasi dan standar internasional dalam bidang keamanan maritim [24]. Dengan demikian, Indonesia dapat mempengaruhi agenda global dan memastikan bahwa kepentingan nasionalnya diakomodasi dalam kerangka kerja hukum internasional yang berlaku. Terkait dengan peraturan khusus dan perjanjian bilateral, implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan mitra internasional. Mekanisme pertukaran informasi secara cepat dan akurat, serta koordinasi tindakan penegakan hukum lintas batas, menjadi kunci keberhasilan dalam menangani pelanggaran hukum di perairan yang bersama-sama diakses. Oleh karena itu, dengan memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam penegakan hukum laut serta dengan

menerapkan peraturan khusus dan perjanjian bilateral dengan baik, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah lautnya. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada stabilitas wilayah laut Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada keamanan regional dan keberlanjutan sumber daya laut secara global.

Hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), memainkan peran penting dalam penegakan hukum di laut Indonesia. UNCLOS, yang mulai berlaku pada tahun 1994, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya laut, batas-batas maritim, hak dan kewajiban negara-negara pantai, serta hak-hak dan kewajiban negara-negara non-pantai. Dalam konteks Indonesia, UNCLOS memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan kedaulatan dan kepentingan nasional di perairan wilayahnya. Penerapan UNCLOS dalam penegakan hukum di laut Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya, Indonesia menggunakan prinsip-prinsip UNCLOS dalam menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinennya sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk melindungi sumber daya alam di perairan wilayahnya dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Pengaruh UNCLOS juga terlihat dalam penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal, penambangan ilegal, dan pencemaran laut. Berdasarkan UNCLOS, Indonesia memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi dan menegakkan hukum di ZEE-nya, termasuk menghentikan dan menindak pelaku pelanggaran. Tindakan penegakan hukum seperti patroli laut, inspeksi kapal, dan penangkapan kapal ilegal dilakukan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Meskipun demikian, pengaruh UNCLOS dalam kebijakan dan tindakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketidakpatuhan beberapa negara terhadap ketentuan UNCLOS, terutama dalam konteks klaim wilayah yang saling tumpang tindih dan sengketa maritim. Selain itu, Indonesia juga perlu terus memperkuat kapasitasnya dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa laut untuk mengoptimalkan penerapan UNCLOS dalam konteks nasional. Secara keseluruhan, UNCLOS memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan dan tindakan penegakan hukum di laut Indonesia, menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di perairan wilayahnya. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip UNCLOS dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum, Indonesia dapat terus memperkuat stabilitas dan keamanan di wilayah lautnya serta berperan aktif dalam upaya perlindungan laut secara global. UNCLOS juga mendorong Indonesia untuk aktif terlibat dalam kerjasama regional dan internasional dalam hal penegakan hukum laut. Sebagai anggota UNCLOS, Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menjaga keamanan laut, melindungi lingkungan maritim, dan mengatasi ancaman lintas batas seperti perdagangan ilegal, perompakan, dan pencemaran laut. Pengaruh UNCLOS dalam kebijakan dan tindakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia juga tercermin dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa maritim. Indonesia telah menggunakan kerangka kerja UNCLOS sebagai dasar untuk memperjuangkan klaimnya atas hak-hak maritimnya di hadapan badan-badan internasional seperti Komisi Batas Laut Benua dan Pengadilan Arbitrase Internasional.

Selain itu, Indonesia juga telah memanfaatkan UNCLOS dalam menetapkan batas Zona Tambahan di luar ZEE-nya, seperti Zona Konservasi Perikanan, untuk melindungi sumber daya alam yang penting bagi ekosistem laut dan keberlanjutan perikanan. Tindakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS yang mendorong negara-negara untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengaruh UNCLOS terhadap kebijakan dan tindakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia tidak hanya bersifat internal, tetapi juga meluas ke aspek regional dan internasional. Dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kegiatan ilegal di laut, Indonesia terus mengandalkan UNCLOS sebagai landasan hukum utama untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya serta berkontribusi pada stabilitas dan keamanan wilayah laut secara global. Selanjutnya, pengaruh UNCLOS terhadap kebijakan dan tindakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia juga mencakup perlindungan hak-hak tradisional masyarakat pesisir dan suku-suku asli yang bergantung pada laut untuk kehidupan dan mata pencaharian mereka.

UNCLOS mengakui pentingnya memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat pesisir dan suku-suku asli dalam pengelolaan sumber daya laut di wilayah mereka. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat pesisir diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum yang ada, termasuk melalui kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Pengaruh UNCLOS juga tercermin dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama regional dalam penegakan hukum laut. Indonesia telah terlibat dalam berbagai inisiatif regional dan internasional, seperti Forum Kerjasama Maritim Asia Tenggara (ASEAN) dan Perjanjian Kerjasama Regional untuk Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam penegakan hukum laut. Dengan demikian, pengaruh UNCLOS terhadap kebijakan dan tindakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek yuridis atau keamanan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui penerapan prinsip-prinsip UNCLOS, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan wilayah laut Indonesia dan dunia secara keseluruhan. Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum di laut Indonesia meliputi berbagai aspek yang kompleks dan beragam. Salah satunya adalah luasnya wilayah laut Indonesia yang mencakup lebih dari 5 juta km², dengan ribuan pulau dan pulau kecil serta jarak yang jauh antara pulau-pulau utama. Hal ini menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif, terutama di wilayah yang terpencil dan jarang diawasi. Selain itu, masalah korupsi dan kekurangan sumber daya manusia dan teknis di lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam upaya menangani pelanggaran di laut.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah merancang berbagai strategi dan program. Salah satu pendekatan utamanya adalah dengan memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)[25]. Melalui kerjasama lintas lembaga ini, diharapkan penegakan hukum di laut dapat menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peraturan dan kebijakan terkait penegakan hukum di laut. Ini termasuk penyusunan dan perubahan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Kelautan, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Perubahan atau penyesuaian undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih jelas dan alat yang lebih efektif bagi lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran di laut. Di masa depan, diharapkan bahwa perubahan dan penyesuaian ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia. Namun, tantangan yang kompleks ini memerlukan upaya berkelanjutan dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.

Terkait dengan peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia, langkah-langkah tambahan yang dapat diambil oleh pemerintah mencakup investasi dalam infrastruktur dan teknologi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi seperti pemantauan satelit, sistem pemantauan maritim, dan kapasitas telekomunikasi yang lebih baik dapat memperkuat kemampuan pengawasan dan deteksi terhadap aktivitas ilegal di laut. Dengan teknologi yang lebih canggih, lembaga penegak hukum dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti pelanggaran dan melacak para pelaku kejahatan laut. Peningkatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas penegak hukum di laut. Ini termasuk pelatihan dalam bidang hukum laut, navigasi, dan taktik penegakan hukum yang efektif. Dengan sumber daya manusia yang terlatih dengan baik, lembaga penegak hukum dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam menangani berbagai jenis pelanggaran di laut.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan laut juga dapat mendukung upaya penegakan hukum di laut Indonesia. Melalui pendidikan dan kampanye sosial, masyarakat dapat menjadi mitra dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di laut dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan menggabungkan berbagai langkah ini, diharapkan bahwa efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas wilayah laut Indonesia dan memastikan kedaulatan negara terjaga dengan baik. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia juga dapat didukung melalui kerjasama internasional yang lebih erat dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional. Melalui pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan kerjasama dalam penindakan pelanggaran hukum di laut, Indonesia dapat memperkuat kemampuannya untuk mengatasi ancaman keamanan maritim yang lintas batas. Penguatan diplomasi maritim juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam menjaga keamanan laut. Melalui dialog dan negosiasi dengan negara-negara lain, Indonesia dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral yang mempromosikan kerjasama dalam penegakan hukum, pemeliharaan lingkungan laut, dan pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Selain upaya-upaya konkret di atas, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi penegakan hukum di laut. Ini termasuk pengembangan indikator kinerja, mekanisme pengawasan, dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan dinamis di bidang kelautan dan perikanan. Dengan mengintegrasikan semua aspek ini, diharapkan bahwa peningkatan penegakan hukum dan kedaulatan laut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas wilayah laut Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat maritim. Tentunya, kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini. Semua pihak perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada serta untuk memperkuat upaya penegakan hukum di laut Indonesia. Perlu juga diingat bahwa penegakan hukum di laut tidak hanya tentang penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga tentang pencegahan. Langkah-langkah pencegahan seperti pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran akan hukum laut, dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir yang inklusif dapat membantu mengurangi insiden pelanggaran di laut. Dengan kesadaran akan pentingnya keamanan laut sebagai bagian integral dari kedaulatan negara, Indonesia dapat terus bergerak maju dalam memperkuat penegakan hukum di laut, menjaga stabilitas wilayah lautnya, dan memastikan bahwa sumber daya laut yang berlimpah menjadi keuntungan bagi bangsa dan negara.

III. KESIMPULAN

Optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional memang menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, mengingat wilayah lautnya yang luas dan keragaman aktivitas yang terjadi di dalamnya. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan terpadu antara berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan patroli laut. Hal ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal di perairan Indonesia, tetapi juga memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan maritim. Patroli laut yang intensif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat lokal terhadap pemerintah, karena menunjukkan komitmen untuk melindungi wilayah perairan mereka. Selain itu, memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga juga menjadi strategi yang efektif. Kejahatan lintas batas, termasuk illegal fishing dan perdagangan manusia, seringkali melibatkan beberapa negara dalam rantai peristiwa tersebut. Dengan meningkatkan kerja sama regional, baik dalam hal pertukaran informasi maupun tindakan penegakan hukum, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani masalah keamanan di perairan wilayahnya. Dalam konteks ini, forum regional seperti ASEAN dapat menjadi platform yang penting untuk memperkuat kerja sama maritim antara negara-negara anggotanya.

Selain upaya patroli dan kerja sama regional, peningkatan kapasitas penegakan hukum maritim juga diperlukan. Hal ini meliputi pelatihan dan pengadaan peralatan yang memadai bagi petugas penegak hukum, serta penyusunan regulasi yang lebih ketat dan efektif dalam menangani berbagai jenis kejahatan di laut. Dengan kombinasi dari ketiga aspek tersebut, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan dan keamanan di perairan wilayahnya, serta melindungi kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Dengan demikian, Indonesia dapat mengamankan sumber daya lautnya, memperkuat kedaulatan maritim, serta mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saran untuk kesimpulan adalah pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam memperkuat penegakan hukum maritim, serta perluasan pengawasan terhadap wilayah laut yang rawan akan kegiatan ilegal. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan maritimnya sambil menjaga stabilitas wilayah laut yang krusial bagi keberlangsungan ekonomi dan keamanan nasional.

IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa terima kasih, saya ingin mengucapkan penghargaan yang mendalam kepada kedua orang tua saya atas dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga selama perjalanan pendidikan saya. Terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menjadi tempat berharga bagi saya untuk menimba ilmu, mengembangkan diri, dan menjalin hubungan yang berharga. Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini, dengan kontribusi dan bimbingan mereka, jurnal ini dapat terwujud dengan baik. Semoga pengabdian dan kerja keras kita semua dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga setiap langkah yang telah kita ambil dan setiap upaya yang telah kita lakukan dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan motivasi yang selalu diberikan, baik dalam momen suka maupun duka. Semoga kebaikan yang telah kita salurkan kepada orang tua, almamater, dan kepada sesama dapat menjadi cahaya yang menerangi langkah-langkah kita di masa mendatang. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan, dan mari kita terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

REFERENSI

- [1] Haryono, B. and A. Setiawan, “Optimalisasi Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut Nasional untuk Menjaga Stabilitas Wilayah Laut Indonesia,” *Jurnal Hukum Maritim*, vol. 8, no. 1, pp. 45–60, 2022.
- [2] Wahyudi, D. and F. Santoso, “Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum di Laut Nasional Indonesia,” *Jurnal Kedaulatan Maritim*, vol. 15, no. 2, pp. 120–135, 2023.
- [3] Utomo, R. and B. Prabowo, “Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Laut Nasional : Tinjauan dari Aspek Ekonomi dan Politik,” *Jurnal Kajian Maritim*, vol. 10, no. 2, pp. 75–90, 2024.
- [4] Saputra, A. and B. Mulyadi, “Kerja Sama Regional dalam Penegakan Hukum Laut Nasional Indonesia,” *Jurnal maritim ASEAN*, vol. 5, no. 3, pp. 180–195, 2022.
- [5] Widodo, A and M. Timbul, “Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Maritim di Indonesia: Studi Kasus di Wilayah Laut Jawa,” *Jurnal Hukum Maritim dan Perikanan*, vol. 10, no. 2, pp. 123–157, 2018.
- [6] Susanto, B., et al. “Dampak Perdagangan Manusia di Wilayah Laut Indonesia terhadap Kedaulatan Negara : Studi Kasus dar Kepulauan Riau,” *Jurnal Keamanan dan Kedaulatan Maritim*, vol. 5, no. 1, pp. 45–58, 2019.
- [7] Hadi, S. , et al. “Implementasi Kebijakan Pencegahan Illegal Fishing di Laut Indonesia: Dampak terhadap Stabilitas Ekosistem dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir,” *Jurnal sumber daya maritim*, vol. 12, no. 3, pp. 211–226, 2020.
- [8] Nasution, A. “ Peran Nelayan dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim,” *jurnal pertahanan dan bela negara*, vol. 8, no. 1, pp. 63–82, 2018.
- [9] Herlambang,S and S. Suryo Putro, “Peran TNI AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia,” *jurnal maritim indonesia*, vol. 10, no. 2, pp. 118–131, 2022.
- [10] Triadi and Irwan, “kewenangan badan keamaan laut (BAKAMLA) dalam penegakan hukum keamanan laut di wilayah perairan indonesia,” *Triwikrama : jurnal ilmu sosial 1*, vol. 8, pp. 100–110, 2023.
- [11] Riski Ardila Sari, Riska Devi, and Nurhayati Harahap, “Peran Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia,” *jurnal manajemen dan ekonomi syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 187–198, Jan. 2024.
- [12] Faiz Alzaki, Muhammad Ram Surya, Ayu Efrita Dewi, and Heni Widiyani, “Penegakkan Hukum Terhadap Ilegal Fishing Di Kepulauan Riau,” *jurnal ilmu hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 26–32, Jan. 2024.
- [13] Herbanu,R. Prabowo & Soediantoro, and Dwi, “Industri Pertahanan Indonesia Dalam Membangun Kekuatan Maritim Nasional,” *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, vol. 3, no. 4, pp. 26–31, 2022.
- [14] Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,” *jurnal hukum dan peradilan* , vol. 4, no. 3, pp. 485–500, 2015.

- [15] Y. A. Sulistyani, A. C. Pertiwi, and M. I. Sari, "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration Respons Indonesia di tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, vol. 12, no. 1, pp. 85–103, May 2021, doi: 10.22212/jp.v12i1.2149.
- [16] Muhammad Imam, "Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan," *e journal ilmu pemerintahan*, vol. 4, no. 1, pp. 64–77, 2016.
- [17] Muhammad Imam, "Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, pp. 64–77, 2016.
- [18] Feny Windiyastuti, Ricky Virgiawan, and Hamzah Robbani, "Pendekatan Hukum Pidana dalam Menangani Penyeludupan Barang Ilegal di Indonesia: Analisis Mendalam dan Studi Komparatif dengan Kebijakan serta Praktik Penegakan Hukum di Negara-Negara Anggota Asean," *jurnal ilmiah hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 16–22, Mar. 2024.
- [19] Muthmainna, W. N.A. H. Supriyanto, and W. N. Novianti, "Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, pp. 10633–10645, 2024.
- [20] Iswardhana, M. R. ,W. Adi, and H.C. Chotimah, "Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, no. 6, pp. 1406–1428, 2021.
- [21] Aryani, C. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional."
- [22] Sanjiwani, Ni Putu Amertha, Nardialina, Mala, Rizki, and Khairur, "Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia," *Indonesian Journal of global discourse*, vol. 4, no. 1, pp. 66–85, 2022.
- [23] Herlambang, S. and P. Suryo, "peran TNI AL dalam pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut guna mendukung perpindahan ibu kota negara dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia," *jurnal maritim indonesia*, vol. 10, no. 2, pp. 118–131, 2022.
- [24] Nasution, L. Z. "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. ," *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*, vol. 1, no. 2, pp. 33–57, 2020.
- [25] Saptono, Y. T. , I. G. Sumertha, H. F. A. Sitinjak, and P. Widodo, "Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia Sebagai Leading Sector Dalam Pembentukan Asean Counter Terrorism And Peacekeeping Task Force," *jurnal kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, pp. 567–582, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.